

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Assihddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Az, L. S. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo : IAIN Po PRESS.
- Djokosantoso, M. (2003). *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Jakarta : PT. Elex Media.
- Herdianto, H., & Hamadayama, J. (2010). *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta : Erlangga.
- HR, R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Yudicial Review*. Yogyakarta : UII Press.
- Huda, N. (2018). *Ilmu Negara* . Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huntington, S. P. (2012). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kumorotomo, W. (2007). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurniawan, M. I. (2019). *Demokrasi Dan Ham Indonesia*. Sidoarjo : UMSIDA Press.
- Marzuki, P. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Musanef. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Muthhar, M. As. (2018). *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Niravita, A., & Damayanti, R. (2017). *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*. Semarang : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Plato. (2016). *Plato Republik* . Jakarta : PT Buku Seru.

- Poerbopranoto, K. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung : Eresco.
- Rahim, A., Azwar, A., Hafiz, M., & Wirataru, S. (2015). *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*. Malang : Intrans Institute.
- Sarijiyati, Tri Haryani, A., & H. Sutrisno, B. (2022). *Aparatur Sipil Negara dan Pemilu Perspektif Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Deeppublish.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wahjono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : ind-hill co.
- Widjaja, A. . (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta : Rajawali.
- Wijayanti, S. N., & Prasetyoningsih, N. (2009). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta : Lab Hukum Fakultas Hukum UMY.
- Yuli, I. I. (2020). *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

## JURNAL

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan ( Studi Kasus di Indonesia ). *Dialektika Publik*. 49
- Abunawar, H. (2020). Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Lampung Sebagai Perikat Kebhinekaan Aparatur Sipil Negara. *Muhammadiyah Law Review*, 4(1).
- Akbar, W. S., & Frinaldi, A. (2023). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 1(2), 104–111.
- Alwan, M. Z., & Warsono, W. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas Ppkn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 218–232.
- Amir, & Hertanto. (2024). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *Jurnal Publicuho* 6(2), 466–476.
- Ansyari, I., Yazid, M., & Putra, R. (2022). Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ijtihad*, XXXVIII(1), 81–90.
- As, Z. A., Nurdin, N., Rusfiana, Y., & Teguh, P. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024. *Jurnal Academia Praja* 7(1), 44–52.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila

- Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145
- Hadji, K., Fajri, N. N., Azizah, A. N., Wulandari, S., Utami, R. F., & Fani, R. (2024). Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 2(2).
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91.
- Indriasari, R. (2024). Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 173–179.
- Irawan, V., & Desiandri, Y. S. (2024). Keterkaitan ham dengan demokrasi dalam sistem htn di indonesia. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 7(1), 106–115.
- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan / Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*. 3(1).
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94.
- Layyina, B. Q. (2023). Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Terhadap Netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 47–56.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Made, N., Ivani, U., Istri, C., Laksmi, D., Universitas, P., & Rai, N. (2023). Analisa tentang konsep dan teori negara hukum di indonesia. *Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 6, 196–203.
- Marta, D. J. (2023). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Andragogi*, 11(2).
- Matias Neis Watulangi. (2018). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70-88.
- Murti, A., Kusuma, H., & Rizkika, S. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Journal Of Social Science Research*, 3, 5736–5747.
- Nur Khobiburrohma, E., Septiana Margareta, P., & Habbie Hasbullah, M. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148.

- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128.
- Podungge, A. W., & Aneta, A. (2020). Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi* 9(1), 55–65.
- Rani, N. (2020). Netralitas Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara Provinsi Papua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 141.
- Rasiana, R., Viamita, C., Wahyu, P., Rahayu, P., Siti, N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Serang, K., & Banten, P. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. *Journal of Law, Education and Business* 2(1), 640–647.
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 191–209.
- Salim, A., & Susilowati, T. (2024). Surat Keputusan Bersama ( SKB ) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2(1).
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2018). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 445.
- Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Yulia Ningsih, R., Dian Sari, R., & Tiara Maulia, S. (2023). *Civilia : DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI MODEL DEMOKRASI YANG RASIONAL DAN SPESIFIK*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 21-30.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166.

## **KARYA ILMIAH**

- Ningrum, S. P. (2023). Pengawasan Bawaslu Terhadap Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul 2020. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS*. (2010).

*Peraturan Pemerintahan No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.* (2004).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* (1945).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Issue 202875, pp. 1–44). (2023).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* (1999).

## **INTERNET**

antaranews.com. (2024). *KASN: 264 ASN terbukti melanggar netralitas di Pemilu 2024.* <https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>

cnnindonesia.com. (2024). *Laporan KASN: 183 ASN Langgar Netralitas di Pemilu 2024.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206113752-617-1059217/laporan-kasn-183-asn-langgar-netralitas-di-pemilu-2024>

Hukumonline.com. (2024). *Aturan Larangan ASN Berpolitik dan Asas Netralitas.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-larangan-asn-berpolitik-dan-asas-netralitas-lt5c5a830e48153/>

kasn.go.id. (2024). *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024.* <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>

Kompas.com. (2023). *Mayoritas ASN Langgar Netralitas karena Kampanye di Media Sosial Jelang Pemil.* <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/13010231/mayoritas-asn->